



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

UPAYA MEWUJUDKAN KEBIJAKAN YANG INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS

**Disampaikan Oleh:
Asdep Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia
pada acara Seminar FKP ke-5 : Inklusi Disabilitas dalam Pembangunan**

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**



Jakarta, 31 Oktober 2019



Gambaran Umum

Penyandang Disabilitas di Indonesia

8,56% penduduk Indonesia merupakan Penyandang Disabilitas.

- Tingkat partisipasi yang rendah dalam berbagai sektor (pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dll.)
- Tereklusi dari lingkungan sosial.
- Akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas

Penetapan berbagai Kebijakan

- UNCRPD yang telah diratifikasi melalui UU No.19 Th.2011
- UU No.8 Th. 2016
- PP No.52 Th. 2019
- PP No.70 Th.2019
- RPJM 2015~2019 sub bidang kesos
- RPJM 2020-2024

Perubahan Paradigma

- Merubah paradigma *charity based* menjadi *human right based*.
- Merubah penyandang disabilitas sebagai objek menjadi subjek dalam penentuan kebijakan.
- Merubah kebijakan yang semula hanya ditujukan untuk permasalahan sosial menjadi jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Efisiensi & Efektivitas Program

Memasukkan disabilitas sebagai kriteria dalam perencanaan pembangunan akan memberikan hasil yang lebih efektif dengan penggunaan anggaran yang lebih efisien.

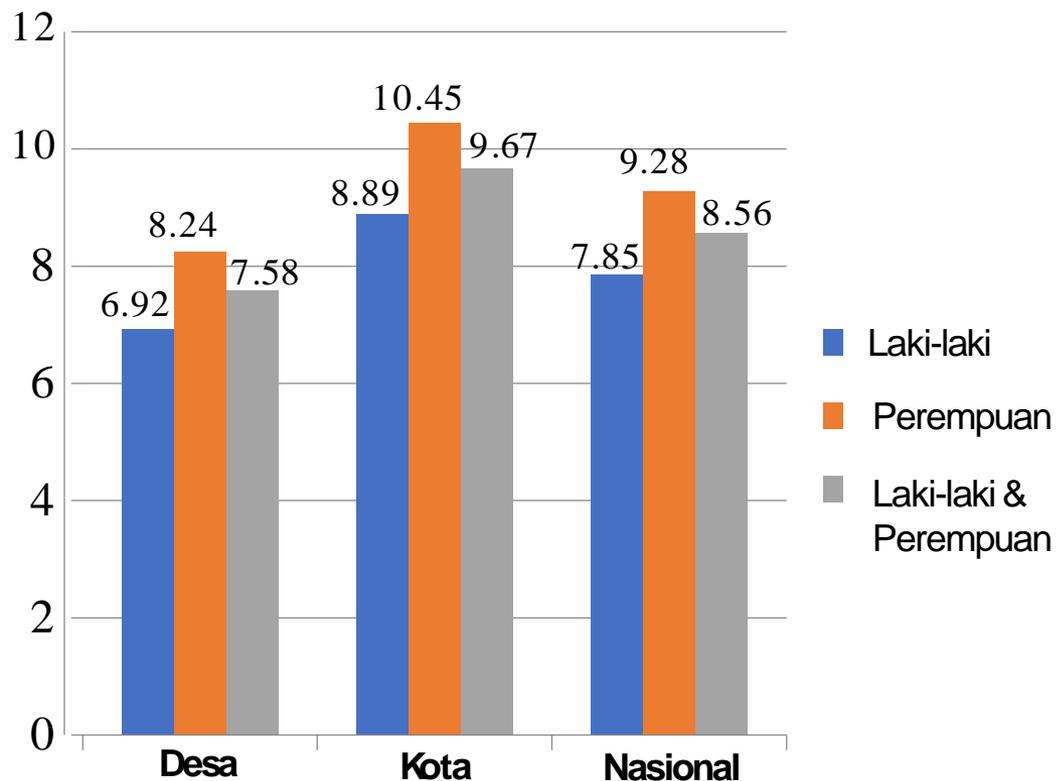
Pedoman bagi K/L dan Pemerintah Daerah

PP No.70 Th.2019 dan RIPID menjadi pedoman bagi K/L dan Pemerintah Daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang inklusif disabilitas.

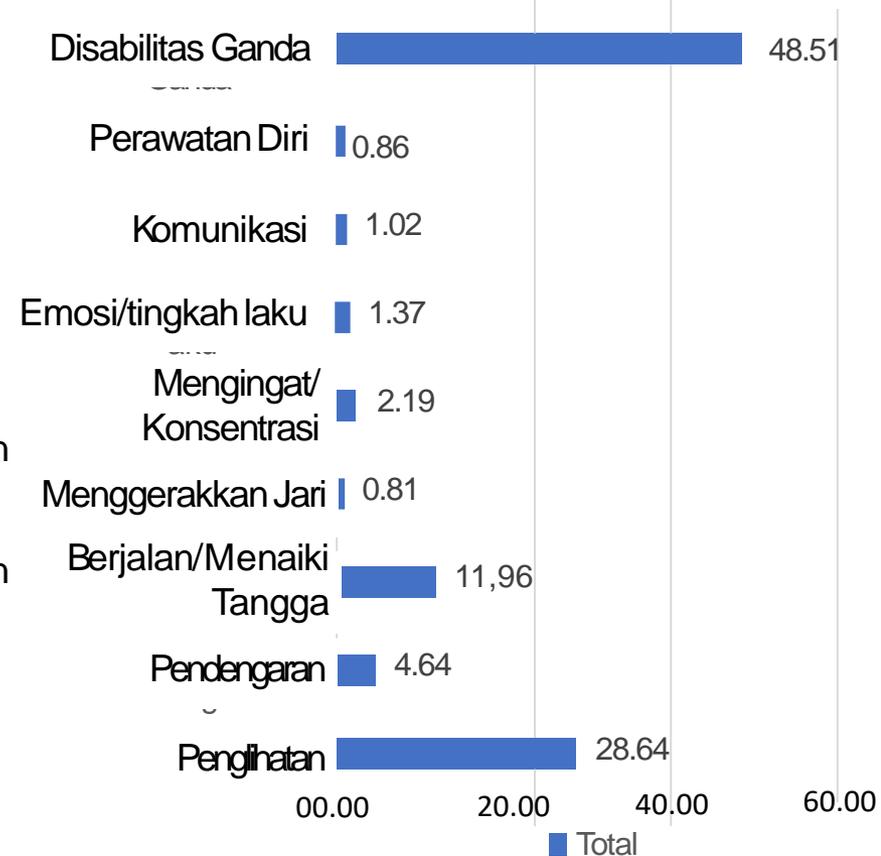


Kondisi Disabilitas

Persentase Penyandang Disabilitas di atas 2 tahun Tahun 2015



Komposisi Penyandang disabilitas berdasar Jenis Disabilitas



Sumber: SUPAS2015

Jumlah penyandang disabilitas berdasar umur & jenis kelamin pada tahun 2015 mencapai **sekitar 21,84 juta orang**

Hampir setengah dari penyandang disabilitas di Indonesia adalah disabilitas ganda

Pembangunan Inklusif Disabilitas

Disability-inclusive development means ensuring that all phases of the development cycle (design, implementation, monitoring and evaluation) include a disability dimension and that persons with disabilities (PwD) are meaningfully and effectively participating in development processes and policies.

Source: *Disability and Development, Handicapped International Website*

Prinsip-prinsip:



Pembangunan inklusif disabilitas dilaksanakan dengan pendekatan *twin-track*:

1. Kegiatan pengarusutamaan disabilitas di seluruh program.
2. Kegiatan yang menargetkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari setiap program berdasarkan kesamaan hak.

Kebijakan Nasional, antara lain:

1. Perpres 2/2015 tentang RPJMN 2015-2019
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
3. PP Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Disabilitas dalam SDGs



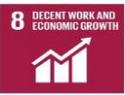
SDG Goal 1

“Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.”



SDG Goal 4

“Membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang ramah terhadap anak, penyandang disabilitas, dan wanita serta menyediakan lingkungan pembelajaran yang aman, anti-kekerasan, inklusif, dan efektif”



SDG Goal 8

“Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, pekerjaan yang layak, serta upah yang sama bagi jenis pekerjaan dengan nilai yang sama, termasuk bagi penyandang disabilitas.”



SDG Goal 10

“Mengurangi kesenjangan dengan memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh pihak tanpa pengecualian umur, jenis kelamin, disabilitas, ras, etnis, agama, status ekonomi, dan status sosial lainnya.”



SDG Goal 11

“Menciptakan kota dan permukiman yang aman dan berkelanjutan, dengan fokus pada masyarakat rentan termasuk penyandang disabilitas.”



SDG Goal 17

“Meningkatkan ketersediaan data yang berkualitas, tepat waktu, dan terpercaya berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis, dan karakteristik lainnya yang relevan secara nasional.”

KERANGKA KEBIJAKAN MEMBANGUN MASYARAKAT INKLUSI UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

- Program pencegahan
- Deteksi dini
- Pelayanan dasar kesehatan
- Pendidikan dan kesejahteraan sosial
- Akses terhadap kelompok rentan terutama anak dan perempuan

Penanganan Berkelanjutan

- Tersedianya layanan rehab-medik
- Pencegahan dampak yang memperburuk kondisi disabilitas
- Tersedianya fisio terapi/vokasional terapi/terapi lainnya

Siklus Hidup

Membangun Masyarakat Inklusi

- Perlakuan dini (*Early Treatment*) terhadap ibu hamil dan balita
- Pendidikan inklusi
- Dukungan dan perawatan bagi anak yang memiliki disabilitas berat
- Perawatan alternative/perawatan oleh komunitas
- Reformasi hukum
- Kesempatan pendidikan setinggi-tingginya dan pelatihan
- Perawatan dan dukungan berkelanjutan
- Jaminan sosial, jaminan kesehatan dan berbagai bentuk jaminan lainnya

Prioritas Pengarusutamaan dalam Kebijakan Pemerintah

✓

- Human rights based approach dalam pendekatan perencanaan pembangunan

✓

- Kebijakan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan dalam memberikan akses untuk semua

✓

- Harmonisasi kebijakan

✓

- Adanya layanan publik yang mudah diakses, murah dan cepat serta non diskriminasi dan menggunakan prinsip kesetaraan

.....Prioritas Pengarusutamaan dalam Kebijakan Pemerintah

Kebijakan sudah bermuatan keadilan bagi semua

Adanya anggaran yang menunjang untuk pelaksanaan kebijakan penyandang disabilitas

Hasil yang diharapkan

Perubahan persepsi dari pembuat kebijakan penyandang disabilitas

Adanya layanan publik yang non diskriminasi, mudah, murah, cepat dan memberikan keadilan

PRIORITAS PROGRAM K/L DALAM RENCANA AKSI HAM

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Kepastian Hukum
4. Ketenagakerjaan
5. Masyarakat Miskin Dan Rentan (Komunitas Adat Terpencil/KAT)
6. Lingkungan Hidup
7. Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- 8. Disabilitas**
9. Pangan
10. Intoleransi

Kemensos

- Penyusunan RPP mengenai Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas
- Penyusunan RPerpres mengenai Komisi Nasional Disabilitas
- Penyusunan RPerpres mengenai Penghargaan

Kemenkes

- Peta Jalan Layanan Kesehatan Inklusi Disabilitas

KemenKUMHAM

- Penyediaan prasarana dan sarana informasi bagi penyandang disabilitas di kantor imigrasi seluruh Indonesia
- Penyusunan RPP mengenai Akomodasi yang Layak Bagi Disabilitas dalam Proses Peradilan

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

- Pemberian penghargaan bagi pelaku olahraga disabilitas yang berprestasi internasional (peraih medali)
- Fasilitasi olahragawan penyandang disabilitas dalam kegiatan ASEAN Paragames
- Fasilitasi olahragawan penyandang disabilitas dalam kegiatan ASIAN Paragames

Kementerian Perhubungan

- Peningkatan Layanan Sarana dan Prasarana perhubungan bagi: lanjut usia, wanita/ibu hamil, penyandang disabilitas dan anak

Kemendikbud

- Pelatihan guru/ pendamping bagi siswa penyandang disabilitas di sekolah umum
- Peningkatan sekolah inklusi bagi penyandang disabilitas
- Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif Penyandang Disabilitas
- Penyusunan RPP tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

Kepolisian Negara RI

- Tindak lanjut penyusunan nota kesepahaman (MoU) antara Kepolisian dengan Kementerian Sosial mengenai penyediaan pendamping dan pengampu (wali), dan ahli dalam proses hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia

PROGRAM-PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS



PENCEGAHAN

- Peningkatan **inklusi** bagi penyandang disabilitas (melalui kerangka regulasi dan pengarusutamaan).
- Penguatan **fungsi keluarga dan masyarakat** untuk pengasuhan dan pencegahan resiko (penguatan pekerja sosial).



PENANGANAN



- **Transfer Aset:** Bantuan modal ekonomi produktif (UEP) dan pendampingan kewirausahaan.
- **Pemberian alat bantu khusus** bagi penyandang disabilitas –3.000
- **Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial:** 50.048 (2019)
- **Literasi Akses** ---35
- **Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar:**
 - a) **ASPDB** (Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas): 22.500 Orang (2019)
 - b) **PKH** (Program Keluarga Harapan): mulai akhir tahun 2016 menambahkan komponen Disabilitas 103.252 KPM (2018) dan 103.898 (2019)



SASARAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INKLUSI DISABILITAS (RIPID)

1

PENDATAAN DAN PERENCANAAN INKLUSIF

2 arah kebijakan & 7 strategi implementasi

2

LINGKUNGAN TANPA HAMBATAN BAGI PD

5 arah kebijakan & 13 strategi implementasi

3

PERLINDUNGAN HAK DAN AKSES PADA KEADILAN

3 arah kebijakan & 6 strategi implementasi

4

PEMBERDAYAAN & KEMANDIRIAN PD

3 arah kebijakan & 4 strategi implementasi

PERWUJUDAN EKONOMI INKLUSIF

3 arah kebijakan & 12 strategi implementasi

5

PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

4 arah kebijakan & 8 strategi implementasi

6

AKSES & PEMERATAAN LAYANAN KESEHATAN

4 arah kebijakan & 8 strategi implementasi

7

Upaya#1 Sensitisasi Disabilitas

01

PEMAHAMAN MENDALAM

Pengertian, ragam dan cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas

02

ALAT DASAR DAN KONSEP

Mengenalkan konsep dan cara yang bisa diaplikasikan di organisasi masing-masing

03

STIMULAN

Menstimulasi perubahan aktual dan berarti untuk membangun kesetaraan

04

KEBIJAKAN INKLUSIF

Implementasi pengetahuan dan *willingness* dalam sebuah rencana tindak lanjut atau kebijakan yang punya efek lebih luas

Contoh Praktik Baik Layanan Keuangan

OJK telah menyusun payung hukum terkait penyedia layanan keuangan bagi penyandang disabilitas: POJK No. 1/2013 dan POJK No. 76/2016; PTO pelayanan keuangan bagi penyandang disabilitas



- ATMAudio untuk Tuna Netra
- Informasi lokasi ATM sesuai kebutuhan PD



- ATM ramah disabilitas
- Pintu otomatis dan ATM bagi pengguna kursi roda



- Pemberdayaan Ekonomi PD
- Training of Trainer (ToT)



- Kantor cabang Mandiri ramah PD: Plaza Mandiri, RSCM, Daan Mogot, Kebon Sirih dan Semarang
- CSR Program PD: Kriya Mandiri program mengundang PD magang di Mandiri

Praktik Baik Layanan Kesehatan Inklusif

Kesehatan

Puskesmas Cimaung Jadi Puskesmas Ramah Disabilitas Pertama di Jawa Barat

Kamis, 23 Februari 2017 15:22



TRIBUN JABAR/W SYARIF ABDUSSALAM

Ketua Forum Kabupaten Bandung Sehat sekaligus Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Nia Kurnia Dandang Nasier, memandu pelayanan kesehatan bagi warga disabilitas di Puskesmas Cimaung yang kini ramah disabilitas, Kamis (23/2/2017).

RSA UGM Berkomitmen Menjadi Rumah Sakit Ramah Difabel

Senin, 4 Desember 2017 19:25



Tribun Jogja/ Norristera Pawestri

Dokter Spesialis Anak RSA UGM, dr. Ade Febrina Lestari Msc.Spa.

Puskesmas Janti, Kota Malang yang menyediakan huruf braille dalam layanannya.



Upaya#2 Perencanaan yang Inklusif dimulai dari Desa



- ❑ Dalam konteks **UU 6/2014 tentang Desa**, kebijakan dana desa menjadi salah satu instrumen anggaran untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak kelompok marginal. Kebijakan Dana Desa diatur lebih lanjut dalam PP 8/2016, di mana setiap tahunnya pemerintah menerbitkan regulasi tentang prioritas penggunaan dana desa.
- ❑ Dalam **Pasal 127, PP 43/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa** menyebutkan bahwa ‘pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Upaya#3 Penganggaran Partisipatif



PARTICIPATORY
BUDGETING PROJECT



- ❑ *Participatory Budgeting* (UN Habitat, 2004) adalah proses demokrasi langsung, sukarela dan universal untuk memutuskan anggaran dan kebijakan publik.
- ❑ Penganggaran partisipatif membutuhkan *political will* dari pengambil keputusan → pemahaman kepala daerah ttg pembangunan inklusif.



Kesepahaman dan kesepakatan tentang pertimbangan alokasi. Penentuan prioritas tuntutan yang disesuaikan dengan alokasi.



Membuka akses informasi terkait periode dan tahapan rencana rapat penganggaran, serta mekanisme yang jelas tentang aturan, metode, dan pembagian peran.



Membuat ketentuan dalam juknis penyusunan RKPDes harus memerhatikan representasi kelompok marjinal, paling sedikit 30%



*Dari tahu menjadi mau
lalu mampu.*

Upaya#4 Membangun Komitmen Daerah Inklusif

Jokowi Ingin Semua Kabupaten dan Kota di Indonesia Ramah Disabilitas

Henz Jimenez Salim
16 Okt 2018, 10:18 WIB



Presiden Joko Widodo atau Jokowi. (Liputan6.com/Henz Jimenez Salim)

Liputan6.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginginkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia ramah untuk masyarakat disabilitas. Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau fasilitas bagi disabilitas di kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Selasa (16/10/2018).

"Kita ingin dorong agar semua provinsi, kota, kabupaten juga ramah terhadap disabilitas. Ini ke depan ingin terus kita dorong, sehingga yang kurang apa nanti secara detail saya diberi masukan oleh Pak Menteri PU, Pak Gubernur juga beri masukan," kata Jokowi.



ASOSIASI PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA

Per Januari 2018, ada 11 Provinsi, 11 Kabupaten dan 7 kota yang memiliki peraturan daerah terkait disabilitas. Dari semuanya, 5 Perda yang terbit setelah adanya UU 8/2016 (Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bone, dan Kota Sawahlunto).

APEKSI bersama UNESCO telah membentuk *Jaringan Walikota Indonesia untuk Kota Inklusif*: Banda Aceh, Padang, Metro, Jogja, Banjarmasin, Ambon. Tahun 2017 bergabung: Jambi, Bengkulu, Jakpus, Tangsel, Surakarta, Kupang, Denpasar, Mojokerto, dan akan terus bertambah.

Sejak 2017 UNESCO telah mengembangkan instrumen **penilaian kota inklusif** yang dapat dijadikan referensi bagi tiap kota untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.



"Salah satu syarat untuk *liveable*, kota itu harus inklusif. Pengertian konteks *liveable* ini adalah kota itu harus nyaman dihuni, ditempati segala macam kelompok, segala macam penduduk tanpa memperhatikan umur, gender, *disable* atau tidak *disable*," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Upaya#4 Monev pembangunan inklusif

Pengawasan di tiap tingkat pembuatan kebijakan yang memperkuat satu sama lain



Pembangunan Inklusif Disabilitas memastikan:





Terimakasih

www.kemenkopmk.go.id





Lampiran:

www.kemenkopmk.go.id



SSI: PENDATAAN PERENCANAAN INKLUSIF PENYANDANG DISABILITAS

Arah Kebijakan

Pengumpulan dan harmonisasi data penyandang disabilitas (PD) lintas sektor

Pelibatan PD dalam proses perencanaan dan penganggaran

Strategi Implementasi

- Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
- Menyusun Permen tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Terpilah
- Menyelenggarakan pendataan disabilitas di Pusat dan daerah
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pendataan PD
- Menyusun mekanisme konsultasi publik
- Mengoptimalkan pembinaan Pemerintah kepada Pemda tentang inklusivitas PD
- Mengintegrasikan isu disabilitas dalam perencanaan (RPJMN, Renstra, Renja, RKA)

SS2: LINGKUNGAN TANPA HAMBATAN BAGI DISABILITAS

Arah Kebijakan

Peningkatan pelayanan dan fasilitas publik yang akses bagi PD

Penyediaan layanan transportasi publik yang mudah diakses

Akses permukiman yang terjangkau dan mudah diakses bagi PD

Penyediaan sistem komunikasi dan informasi publik yang mudah diakses, andal dan responsif terhadap kebutuhan PD

Penyediaan akses dan kemudahan dalam beribadah bagi PD

Strategi Implementasi

1. Memasukkan materi tentang pemahaman isu disabilitas dalam
2. Mengembangkan SOP penyediaan fasilitas dan layanan publik yang akses bagi PD
3. Memastikan indikator SPM sesuai dengan prinsip non diskriminasi dan akomodasi yang layak bagi PD;
4. Memastikan variabel disabilitas dalam instrumen penilaian pelayanan dan fasilitas publik oleh KL dan Pemda
5. Melaksanakan monev pelaksanaan layanan publik yang mudah diakses PD

1. Dukungan penyediaan permukiman yang layak, terjangkau dan aksesibel bagi Penyandang Disabilitas
2. Mendorong Pemda untuk menetapkan Perda tentang standar bangunan

1. Layanan transportasi publik yang akomodatif bagi PD
2. Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan oleh petugas bagi PD

1. Menyusun kebijakan & SOP layanan teknologi dan informasi bagi PD
2. Meningkatkan akses PD dalam mengakses teknologi dan informasi

1. Meningkatkan akses PD terhadap tempat ibadah
2. Meningkatkan kemudahan PD dalam beribadah dan ziarah suci

SS3: PERLINDUNGAN HAK DAN KSES PADA KEADILAN

Arah Kebijakan

Menjamin hak politik secara penuh bagi PD

Perlindungan PD dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran dalam proses peradilan dan tahapan pelaksanaan putusan

Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap tindak kekerasan bagi PD

Strategi Implementasi

1. Menjamin inklusivitas dalam setiap tahapan Pemilu

2. Meningkatkan keterwakilan PD dalam politik

1. Menyusun standar pemeriksaan bagi seluruh aparat penegak hukum (penuntut umum, penyidik, hakim, petugas lapas, dsb)

2. Edukasi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus PD

1. Sosialisasi dan kampanye publik melalui berbagai media

2. Internalisasi hasil studi atau riset terkait tindak kekerasan dalam materi sosialisasi dan kampanye publik

SS4: PEMBERDAYAAN DAN KEMANDIRIAN DISABILITAS

Arah Kebijakan

Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi PD dan keluarganya

Meningkatkan kapasitas layanan habilitasi dan rehabilitasi oleh lembaga dan masyarakat

Meningkatkan cakupan program kesejahteraan sosial bagi PD miskin

Strategi Implementasi

1. Memberikan pelatihan penguatan kapasitas pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi
2. Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang mengimplementasikan kurikulum dan pedoman RBM

Memperkuat kapasitas pendamping dalam melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya

Memastikan implementasi peraturan pelaksanaan kesejahteraan sosial

SS: PERWUJUDAN EKONOMI INKLUSIF

Arah Kebijakan

Memperkuat pemahaman ttg ketenagakerjaan inklusif pada K/L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta di seluruh sektor

Memperluas akses lapangan kerja bagi PD untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi

Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif PD

Strategi Implementasi

- | | | |
|--|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun modul pelatihan Sensitivitas Disabilitas bagi K/L,2. Sensitivitas Disabilitas dalam program diklat dengan K/L, Pemda, BUMN/ BUMD. | <ol style="list-style-type: none">1. Menyusun pedoman ketenagakerjaandisabilitas2. Meningkatkan K/Ldan perusahaan yang menerapkan pedoman ketenagakerjaan3. Meningkatkan kapasitas PD dalam berwirausaha Memasukkan PD sebagai kriteria kredit usaha5. Memastikan jaminan kesehatan& ketenagakerjaan PD6. Mendorong partisipasi perusahaan untuk PD7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pedoman ketenagakerjaan | <ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan pelatihan literasi keuangan bagi PD2. Menyediakan layanan dan fasilitas keuangan yang akses bagi PD3. Menambah inovasi produk dan layanan keuangan bagi PD |
|--|---|--|

SS: PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN

Arah Kebijakan

Memperkuat kemampuan institusi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk memberikan layanan pendidikan inklusif bagi anak hingga PD dewasa

Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi PD dan Non-PD

Memastikan inovasi tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan, tanggap terhadap kebutuhan PD

Membuka kesempatan PD di bidang kesenian dan olah raga

Strategi Implementasi

1. Mengadakan diklat bagi tenaga pendidikan/calon pendidik dan tenaga kependidikan tentang layanan inklusif;
2. Menyediaan fasilitas dan layanan belajar mengajar yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tungkatan pendidikan;
3. Menyusun peraturan yang mendorong pendidikan inklusif

1. Memasukkan kriteria non diskriminasi dan inklusivitas dalam dokumen supervisi berkala ke sekolah/ madrasah, sekolah dan PT;
2. Memberi keringanan batas usia bagi PD agar dapat mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya

1. Mengembangkan program deteksi dan intervensi dini dalam program Dikdas Usia Dini Holistik-Integratif
2. Membentuk ULD, PAUD, Dikdas dan tinggi dengan memberi bantuan profesional bagi lembaga penyelenggara pendidikan

Mendorong peningkatan partisipasi PD dalam kompetisi bidang kesenian dan olah raga

SS7: AKSES & PEMERATAAN LAYANAN KESEHATAN

Arah Kebijakan

Peningkatan kemampuan penyedia layanan kesehatan bagi PD

Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan

Perluasan kepesertaan dan manfaat JKN bagi PD

Penyelenggaraan program GERMAS yang menjangkau PD

Strategi Implementasi

Memasukkan indikator pelayanan penyandang disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi penyandang disabilitas perempuan
2. Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang dewasa terhadap potensi disabilitas

1. Memperluas kepesertaan PD miskin sebagai penerima PBI JKN
2. Memastikan cakupan manfaat JKN mampu mengakomodir kebutuhan PD

Mendorong K/L, Pemda, sektor swasta untuk melibatkan PD dalam kegiatan GERMAS